



Mojokerto
Full of Majapahit Greatness

BerAKHLAK #bangga
melayani
banasa



RENCANA KERJA TAHUN 2026

**Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Mojokerto**

DAFTAR ISI

Daftar isi..... i

Daftar tabel..... ii

Kata Pengantar..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan..... 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 8

LALU.....

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II 8

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 17

Daerah 17

2.4 Review Terhadap RKPD..... 19

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 28

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 30

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 43

BAB V PENUTUP 52

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja BKPSDM Tahun 2024.....	10
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025.....	11
Tabel 2.3	(TC.30) Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	21
Tabel 2.4	(TC.31) Review terhadap Renja Perangkat Daerah tahun 2025.....	29
Tabel 2.5	(TC.32) Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan APBD tahun 2026	35
Tabel 3.1	Matrik rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Mojokerto tahun 2026.....	44

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

KATA PENGANTAR

Pembangunan adalah merupakan upaya perubahan ke arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat yang dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah yaitu APBD.

Pembangunan yang direncanakan secara baik berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah disusun melalui mekanisme dan dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang disusun pada Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dan penjabaran atas dokumen perencanaan daerah lima tahun.

Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto memberikan gambaran tentang kebijakan, program dan kegiatan selama satu tahun kedepan, yang merupakan pedoman pelaksanaan diharapkan dapat memberikan arah dan tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Perangkat Daerah dalam menunjang kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Demikian semoga tujuan disusunnya Rencana Kerja ini dapat terwujud sesuai dengan harapan kita semua.

Mojokerto, 21 Juli 2025

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Mojokerto



Tatang Marhaendrata, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196706261987031002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sub kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi adalah sekumpulan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mojokerto di bentuk sebagai Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian dalam bidang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam menciptakan aparat yang profesional yaitu berkompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban, netral, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berwawasan kesatuan dan kebangsaan sehingga dapat melayani masyarakat dan dunia usaha.

Sebagai dokumen perencanaan, Renja BKPSDM tahun 2026 memuat kebijakan, program kerja prioritas, kegiatan pembangunan beserta pendanaannya sehingga tercipta keselarasan dalam rangka pembangunan Daerah. Renja yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi organisasi disusun berdasarkan prinsip-prinsip :



1. Mengacu pada RKPD tahun yang bersangkutan, yang digunakan untuk merumuskan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif;
2. Mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penetapan tujuan, sasaran kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan prakiraan maju tahun berikutnya;
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagai landasan perumusan kegiatan alternatif untuk mencapai sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;
4. Sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Renja Perangkat Daerah serta dapat menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 adalah:

1. Undang – undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan



Gender Dalam Pembangunan Nasional;

10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012



- tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Daerah;
 23. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
 24. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 – 2026;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029;
 27. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto adalah:

1. Merupakan arah dan pedoman/acuan dalam penyelenggaraan pembangunan SDM Aparatur dalam jangka 1 (satu) tahun kedepan di tahun 2026;
2. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam pembangunan SDM Aparatur;
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada tahun anggaran 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN



Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN;

Pada bagian ini di jelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

I.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjut proses penyusunan APBD.

I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

I.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan



kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai:

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap RKPD

Berisikan Uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap RKPD

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan



tersebut diperoleh;

- b. Penjelasan penyesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah.

Sajian Tabel TC-32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai: Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sajian Tabel TC-33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2025.

Bab IV P E N U T U P



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 secara umum selaras dengan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Rencana Kerja Perangkat Daerah ini, mengacu dan berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto, dengan fokus melakukan analisa terhadap kondisi existing Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Mojokerto tahun 2026 terdiri dari 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan yang sangat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Mojokerto tahun 2026 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mencakup kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;



- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Kepegawaian Daerah, mencakup kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
 - Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK;
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - Pengelolaan Data Kepegawaian.
- b. Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Pengelolaan Mutasi ASN;
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
- c. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
 - Pembinaan Disiplin ASN.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, mencakup kegiatan sebagai berikut :



- a. Pengembangan Kompetensi Teknis, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;

Adapun realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto per tanggal 31 Desember 2024 sebesar 95,02% dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran sebelum Perubahan APBD	Rp. 10.235.472.904,00
- Pengurangan APBD	Rp. 20.400.600,00
- Anggaran setelah Perubahan APBD	Rp. 10.215.072.304,00
- Realisasi	Rp. 9.705.931.763,00
- Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	Rp. 509.140.541,00

Realisasi anggaran telah melebihi target kinerja yang ditetapkan sebesar 93%. Sisa anggaran yang tidak terealisasi merupakan efisiensi belanja dan juga sisa anggaran gaji 2 orang pegawai yang telah pensiun.

Adapun capaian kinerja tahun 2024 sesuai dengan yang diperjanjikan dapat diuraikan seperti pada tabel berikut:



Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tabel 2.1 Capaian Kinerja BKPSDM Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Persentase ASN dengan IP ASN Kategori Tinggi		75,50%	78,63%	104%

KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP perangkat daerah	85	85,10	100,12%
	1.2	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	93%	95,02%	102%
	1.3	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	88,75	83,03	94%
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		7	7	100%



Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tabel 2.2 T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
KABUPATEN MOJOKERTO

BADAN KEPEGAWAIN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2024			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan (Bulan Desember)	
					Target Renja SKPD tahun 2024	Realisasi Renja SKPD tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			n	(n-3)	(n-2)	(n-2)	(%)	(n-1)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
5.03	Kepegawaian									
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	84,4	85	85,1	100%	85,5	85,5	100%
			3 inovasi	N/A	7 Inovasi	N/A	N/A	7 Inovasi	7 Inovasi	100%
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Indikator Program Perangkat Daerah	90%	90%	90%	100%	111%	90%	90%	100%
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	89%	87%	88%	95,02%	108%	89%	89%	100%
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	83	81,5	82	83,03	101%	83	83	100%

5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	88%	86%	87%	100%	115%	88%	88%	100%
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang tersedia	12 Unit	N/A	2 Unit	2 Unit	100%	12 Unit	12 Unit	100%
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	92%	91%	91%	100%	110%	92%	92%	100%
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	89%	88%	88%	90%	102%	89%	89%	100%
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi	80%	78%	79%	98%	124%	80%	80%	100%
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	33 dokumen	15 dokumen	33 dokumen	33 dokumen	100%	33 dokumen	33 dokumen	100%
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1900 Dokumen	15 dokumen	2335 Dokumen	2133 dokumen	91%	1900 Dokumen	1900 Dokumen	100%
		Persentase peningkatan kualifikasi ASN	84%	77,20%	83%	77,97%	94%	84%	84%	100%
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan	180 Orang	125 orang	125 orang	207 orang	143%	180 orang	180 orang	100%
		Persentase peningkatan kinerja ASN	99,80%	99,76%	99,78%	99,51%	100%	99,80%	99,80%	100%
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Laporan	352 dokumen	5 Laporan	5 Laporan	101%	5 Laporan	5 Laporan	100%
		Persentase pelanggaran Disiplin ASN	0,20%	0,24%	0,22%	0,14%	136%	0,20%	0,20%	100%

5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetensi ASN	75%	64,70%	70%	253%	361%	75,00%	75,00%	100%
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	11.000 orang	10.000 orang	11.000 orang	14.850 orang	98%	11.000 orang	11.000 orang	100%
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	24 laporan	33 laporan	10 laporan	10 laporan	100%	24 laporan	24 laporan	100%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten.

Melihat kondisi tersebut diatas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto hanya melaksanakan urusan pemerintah urusan penunjang, yang tidak menggunakan indikator rencana kerja pembangunan daerah seperti, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma Standar Pelayanan Kerja (NPSK). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto adalah Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang merupakan Indikator penunjang urusan pemerintahan daerah.

Sebagaimana dapat di uraikan pada Tabel TC-30



Tabel 2.4 TC.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Rentsra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n+2)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase meningkatnya ASN dengan IP ASN Kategori Tinggi	n/a	n/a	74 %	75 %	76 %	n/a	75 %	78,63 %	n/a	n/a	n/a
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	n/a	n/a	84,8	85	85,5	n/a	84,4	85,1	n/a	n/a	n/a
3	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	n/a	n/a	88 %	89 %	90 %	n/a	92,93 %	95,02 %	n/a	n/a	n/a
4	Indeks Profesionalitas ASN	n/a	n/a	82	83	84	n/a	88,74	83,03	n/a	n/a	n/a
5	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	n/a	n/a	7 inovasi	7 inovasi	3 inovasi	n/a	7 inovasi	7 inovasi	n/a	n/a	n/a



2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto, maka dapat ditentukan isu-isu penting sebagai berikut:

- a. Penguatan Sistem Merit
- b. Implementasi manajemen talenta ASN
- c. Pengembangan kompetensi ASN
- d. Digitalisasi pengelolaan kinerja ASN
- e. Penataan tenaga non-ASN atau honorer
- f. Peningkatan pelayanan publik

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Secara organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto bertugas memimpin, melakukan koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan. Kewenangan BKPSDM untuk melaksanakan fungsi tersebut meliputi :

1. Perumusan kebijakan dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;



3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tupoksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

1. Faktor Permasalahan Internal, hambatan :

- 1) Belum optimalnya pengembangan potensi SDM Aparatur BKPSDM;
- 2) Kurang optimalnya pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian;
- 3) Kurang dapat maksimalnya layanan administrasi kepegawaian.

2. Faktor Permasalahan External, hambatan :

- 1) Masih rendahnya kesadaran PNS untuk melengkapi data kepegawaian perorangan;
- 2) Masih rendahnya disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- 3) Kurangnya pemahaman PNS terhadap peraturan kepegawaian.

Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPJMD 2025-2029 satu diantaranya yaitu keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Disamping itu, pengembangan kompetensi SDM Aparatur BKPSDM yang belum optimal, perlu ditingkatkan lagi agar dapat mencapai target SDG's.

Tantangan dan permasalahan serta isu-isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi / catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas



tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Mojokerto yaitu;

1. Mengoptimalkan Sinkronisasi dan Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah berkaitan Program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat mewujudkan konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap perencanaan yang ada.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme pegawai ASN.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi yang ada.
4. Koordinasi terpadu berbasis sistem dan komitmen perencanaan dalam kebersamaan.
5. Efektifitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan secara lebih terstruktur dan terorganisir.

2.4 Review Terhadap RKPD

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam mekanismenya, sesuai amanat Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 20 dinyatakan bahwa Bappeda menyiapkan RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupatendengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik),



Tabel 2.4 TC.31
REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
KABUPATEN MOJOKERTO

RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	
5	10	6	7	8	5	10	6	7	8	9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86	6.880.723.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86	6.093.536.049	
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 inovasi				Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 inovasi		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Mojokerto			20.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Mojokerto			8.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	4.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	4.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Mojokerto			5.616.223.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Mojokerto			5.616.223.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	5.616.223.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	5.616.223.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Mojokerto			50.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Mojokerto			0	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Mojokerto	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		475.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Mojokerto	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		138.578.119	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	235.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	40.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	10.660.853	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	55.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	33.508.638	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	20 dokumen	20.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	20 dokumen	8.419.800	
Penyediaan Bahan / Material	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 paket	45.000.000	Penyediaan Bahan / Material	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 paket	18.753.678	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	5.550.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	80.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	21.685.150	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Mojokerto	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang tersedia		215.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Mojokerto	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang tersedia		20.000.000	
Pengadaan Mebel	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	71 unit	215.500.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	20.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		206.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		181.146.880	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	56.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	46.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	135.146.880	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		298.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		129.588.050	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	68.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	61.000.000	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	215.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	54.588.050	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	15.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	14.000.000	
Program Kepegawaian Daerah	Kabupaten Mojokerto			2.416.500.000	Program Kepegawaian Daerah	Kabupaten Mojokerto			1.015.870.300	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		900.000.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		244.105.175	
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 dokumen	11.699.800	
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5 dokumen	300.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5 dokumen	111.153.575	
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 dokumen	350.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 dokumen	98.764.800	
Pengelolaan Data Kepegawaian	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 dokumen	150.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 dokumen	22.487.000	

Mutasi dan Promosi ASN	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		1.100.000.000	Mutasi dan Promosi ASN	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		625.425.125	
Pengelolaan Mutasi ASN	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	500 dokumen	800.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	500 dokumen	547.876.975	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1500 dokumen	300.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1500 dokumen	77.548.150	
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		416.500.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		146.340.000	
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 laporan	200.000.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 laporan	89.731.000	
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	275 orang	71.500.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	275 orang	7.492.000	
Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	145 orang	145.000.000	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	145 orang	49.117.000	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Mojokerto			3.208.963.000	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Mojokerto			1.672.785.700	
Pengembangan Kompetensi Teknis	Kabupaten Mojokerto	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		1.461.839.000	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kabupaten Mojokerto	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		486.937.700	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kabupaten Mojokerto	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	4344 orang	1.461.839.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kabupaten Mojokerto	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	4344 orang	486.937.700	

Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		1.747.124.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		1.185.848.000	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	227 laporan	1.747.124.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	227 laporan	1.185.848.000	
Total				12.506.186.000	Total				8.782.192.049	

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto merupakan Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kepegawaian dan tugas pembantuan sehingga dalam pelaksanaannya lebih kepada penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto yang juga selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pelayanan Kepegawaian, tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG, sehingga penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat secara langsung belum dapat dilaksanakan.

Dapat di uraikan sebagai berikut pada Tabel TC-32



Tabel 2.5 TC.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN APBD TAHUN 2026
KABUPATEN MOJOKERTO

Nama Perangkat Daerah : **BADAN KEPEGAWAIN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

[illegible]

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dengan dasar itu perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui mekanisme dan tahapan – tahapan perencanaan yaitu Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan oleh unsur penganggaran pemerintahan pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang substansi penyusunannya merupakan penjabaran Visi, Misi arah pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dan merupakan koridor dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistimatis yang didasarkan pada kondisi, potensi proyeksi sesuai kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2006 tentang tatacara penyusunan rencana pembangunan nasional, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra perangkat daerah serta pagu indikatif, maka dengan mengacu pada peraturan pemerintah tersebut, tujuan, sasaran dan kegiatan pembangunan pada rencana kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disinkronisasikan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kementrian/Kelembagaan. Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan nasional yang



menyangkut arah dan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto meliputi 3 (tiga) kementerian / Kelembagaan yaitu :

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementerian PANRB memiliki visi *“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”*

Hal ini dicapai dengan misi antara lain:

- a. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik - *digital bureaucracy*.
- b. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.
- c. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.
- d. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.
- e. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.
- f. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

2. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian Indonesia yang Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. visi BKN Tahun 2020-2024: adalah melaksanakan Visi Presiden Nomor 8 (delapan) yaitu “pengelolaan Pemerintahan yang Bersih Efektif, dan Terpercaya” dengan melaksanakan arahan presiden nomor 4 (empat) yaitu “Penyederhanaan Birokrasi” dan Agenda pembangunan nomor 7 (tujuh) yaitu “Memperkuat stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik” dengan *“Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas*



untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, serta Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada Badan Kepegawaian negara dan penjabaran dari misi Memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang aparatur sipil negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN, serta pengembangan sistem informasi ASN berdasarkan sistem merit, maka terdapat 5 pilar yang menjadi misi Badan Kepegawaian negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

- a. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
- b. Penyelenggaraan manajemen ASN,
- c. Penyimpanan informasi pegawai ASN,
- d. Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN.dan
- e. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN

3. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Lembaga Adminstrasi Negara adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembanga di bidang adminsitrase negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil.

Visi Lembaga Administrasi Negara *“Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia yang Mampu menjadi Penggerak Utama dalam mewujudkan World Class Government Untuk Mendukung Visi Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”*

Misi Lembaga Administrasi Negara adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui:

- a. Mewujudkan SDM Aparatur unggul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar internasional.



- b. Mewujudkan Kebijakan Administrasi Negara yang berkualitas melalui kajian kebijakan berbasis evidence dan penyediaan analisis kebijakan yang kompeten.
- c. Mewujudkan Inovasi Administrasi Negara yang berkualitas melalui pengembangan model inovasi serta penguatan kapasitas dan budaya inovasi.
- d. Memujudkan organisasi pembelajar berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang berkualitas dan berbasis elektronik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto tahun 2026 adalah **“Terwujudnya Profesionalitas ASN”** dengan Indikator Tujuan Indeks Profesionalitas ASN, Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renja;
- 2) Menggambarkan arah renja organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renja.

b. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi Organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran



harus memenuhi kriteria *specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented dan time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Pada tahun 2026 terdapat satu sasaran di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu **“Terwujudnya Pelaksanaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit”**.

Dengan indikator sasaran yaitu:

1. Nilai Penerapan Sistem Merit;
2. Indeks NSPK Manajemen ASN.

Pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi Organisasi, yakni Perangkat Daerah (PD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Menyediakan dokumen perencanaan kebutuhan ASN;
2. Melaksanakan mutasi dan promosi PNS berdasarkan manajemen talenta;
3. Melaksanakan pengelolaan kinerja ASN;
4. Melaksanakan pengembangan kompetensi berdasarkan analisa kesenjangan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

3.3 Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah

a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Mojokerto pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian visi, misi Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah;
2. Pencapaian standar pelayanan Perangkat Daerah;
3. Isu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan;



5. Program dan kegiatan operasional Perangkat Daerah

b. Uraian Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto dalam periode tahun anggaran 2026 menetapkan program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mencakup kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Penyediaan Bahan/Material;
- Fasilitas Kunjungan Tamu;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.



- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Kepegawaian Daerah, mencakup kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - Pengelolaan Data Kepegawaian.
- b. Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Pengelolaan Mutasi ASN;
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
- c. Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.
- d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
 - Pembinaan Disiplin ASN.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, mencakup kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengembangan Kompetensi Teknis, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,



Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;

b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 dapat di uraikan pada Tabel TC- 33 sebagai berikut:



Tabel TC-33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2026
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KABUPATEN MOJOKERTO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		Ket	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	UP	B/L
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan										
5.03	Kepegawaian										
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kabupaten Mojokerto	86	6.093.536.049			86	6.880.723.000		
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Kabupaten Mojokerto	3 inovasi				3 inovasi			
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kabupaten Mojokerto		8.000.000				20.000.000		
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Mojokerto	2 dokumen	4.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		2 dokumen	10.000.000		

Catatan :
 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Mojokerto	7 Laporan	4.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		7 dokumen	10.000.000		
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kabupaten Mojokerto		5.616.223.000				5.616.223.000		
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Mojokerto	37 Orang/bulan	5.616.223.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Orang/bulan	5.616.223.000		
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kabupaten Mojokerto		0				50.000.000		
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Mojokerto	-	0	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		1 paket	50.000.000		
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	Kabupaten Mojokerto		138.578.119				475.000.000		
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Mojokerto	1 paket	40.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		1 paket	235.000.000		
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Mojokerto	7 paket	10.660.853	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		7 paket	25.000.000		

5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Mojokerto	6 paket	33.508.638	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		6 paket	55.000.000		
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Mojokerto	20 dokumen	8.419.800	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		20 dokumen	20.000.000		
5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kabupaten Mojokerto	6 paket	18.753.678	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		6 paket	45.000.000		
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Mojokerto	12 laporan	5.550.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		12 laporan	15.000.000		
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Mojokerto	12 laporan	21.685.150	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		12 laporan	80.000.000		
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang tersedia	Kabupaten Mojokerto		20.000.000				215.500.000		
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Mojokerto	1 unit	20.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		71 unit	215.500.000		

5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Kabupaten Mojokerto		181.146.880				206.000.000		
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Mojokerto	12 laporan	46.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		12 laporan	56.000.000		
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Mojokerto	12 laporan	135.146.880	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		12 laporan	150.000.000		
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Kabupaten Mojokerto		129.588.050				298.000.000		
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Mojokerto	6 unit	61.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		6 unit	68.000.000		
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Mojokerto	1 unit	54.588.050	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		2 unit	215.000.000		
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Mojokerto	7 unit	14.000.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		7 unit	15.000.000		

5.03.02	Program Kepegawaian Daerah		Kabupaten Mojokerto		1.015.870.300				2.416.500.000		
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kabupaten Mojokerto		244.105.175				900.000.000		
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kabupaten Mojokerto	3 dokumen	11.699.800	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		3 dokumen	100.000.000		
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kabupaten Mojokerto	5 dokumen	111.153.575	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		5 dokumen	300.000.000		
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Mojokerto	12 dokumen	98.764.800	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		12 dokumen	350.000.000		
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kabupaten Mojokerto	12 dokumen	22.487.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		12 dokumen	150.000.000		
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Mojokerto		625.425.125				1.100.000.000		

5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kabupaten Mojokerto	500 dokumen	547.876.975	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		500 dokumen	800.000.000		
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Mojokerto	1500 dokumen	77.548.150	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		1500 dokumen	300.000.000		
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Mojokerto		146.340.000				416.500.000		
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Mojokerto	2 laporan	89.731.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		2 laporan	200.000.000		
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kabupaten Mojokerto	275 orang	7.492.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		275 orang	71.500.000		
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kabupaten Mojokerto	145 orang	49.117.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		145 orang	145.000.000		
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Kabupaten Mojokerto		1.672.785.700				3.208.963.000		

5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kabupaten Mojokerto		486.937.700				1.461.839.000		
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kabupaten Mojokerto	4344 orang	486.937.700	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		4344 orang	1.461.839.000		
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Mojokerto		1.185.848.000				1.747.124.000		
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Mojokerto	227 laporan	1.185.848.000	[PAD] - Pendapatan Asli Daerah		227 laporan	1.747.124.000		
					8.782.192.049				10.989.686.000		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran diperkuat dengan penjelasan-penjelasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Demi mewujudkan rencana kerja pembangunan daerah. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah juga melakukan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

**MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rankhir Renja TA 2026			Tambah (Kurang)	Unit Kerja / PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KODE SKPD											
NAMA SKPD											
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
Meningkatkan Integritas dan profesionalitas ASN	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Persentase meningkatnya ASN dengan IP ASN Kategori Tinggi								BKPSDM	
			5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86	6.093.536.049			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
					Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 inovasi					
			5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.000.000			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto

| Renja BKPSDM 2026



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

			5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	4.000.000			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	4.000.000			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.616.223.000			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	5.616.223.000			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		138.578.119			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	40.000.000			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	10.660.853			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	33.508.638			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 dokumen	8.419.800			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto

			5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 paket	18.753.678			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	5.550.000			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	21.685.150			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang tersedia		20.000.000			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	20.000.000			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		181.146.880			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	46.000.000			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	135.146.880			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		129.588.050			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto

			5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	61.000.000			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	54.588.050			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	14.000.000			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.02	Program Kepegawaian Daerah			1.015.870.300			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		244.105.175			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 dokumen	11.699.800			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	5 dokumen	111.153.575			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 dokumen	98.764.800			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto

			5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 dokumen	22.487.000			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		625.425.125			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	500 dokumen	547.876.975			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1500 dokumen	77.548.150			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		146.340.000			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 laporan	89.731.000			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	275 orang	7.492.000			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	145 orang	49.117.000			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			1.672.785.700			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		486.937.700			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto

			5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	4344 orang	486.937.700			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		1.185.848.000			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
			5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	227 laporan	1.185.848.000			BKPSDM	Kabupaten Mojokerto
JUMLAH TOTAL							8.782.192.049				

BAB V

PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Pada tahun 2026 Pemerintah daerah harus melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Permendari 90 Tahun 2019, Program dan kegiatan/sub kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

5.1 Catatan penting

Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan rencana kerja tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2026 yang akan datang.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen Rencana kerja Tahun 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 telah disesuaikan dengan kondisi Renstra 2025-2029 karena hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan.

Mojokerto, 21 Juli 2025

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Mojokerto



Tatang Marhaendrata, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196706261987031002